



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

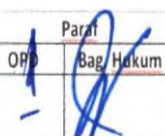
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Pegawai ASN, serta menyesuaikan ketentuan tambahan penghasilan berdasarkan perundang-undangan, perlu mengatur kembali tambahan penghasilan pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


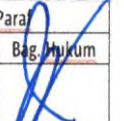
	Paraf
OP	Bag. Hukum

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7545);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

	Para
OPD	Bag. Hukum
	

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten pohuwato Tahun 2016 Nomor 184);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. Diantara pasal 30 dan pasal 31 ditambahkan pasal 30A dan pasal 30B yang berbunyi :

	Paraf
OND	Bag. Hukum



BAB VI A  
TPP TAMBAHAN  
Bagian Kesatu Pemberian  
Pasal 30A

- (1) PNS diberikan TPP Tambahan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Para Asisten;
  - c. Staf Ahli Bupati; dan
  - d. Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau pejabat lain setara Pimpinan Tinggi.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Kedua  
Pembayaran  
Pasal 30B

- (1) TPP Tambahan untuk PNS dibayarkan paling lambat tanggal 20 Mei tahun 2020;
- (2) TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar tarif dasar TPP berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tanpa dikenakan perhitungan hasil penilaian terhadap semua unsur kinerja.
- (3) TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020.
- (5) Mekanisme pembayaran TPP Tambahan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBD Tahun Anggaran 2020.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

Pasal II

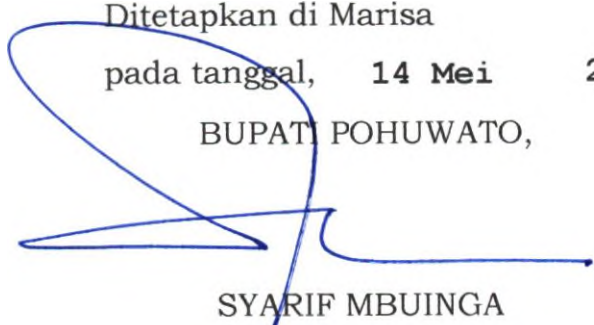
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal, **14 Mei** 2020

BUPATI POHUWATO,

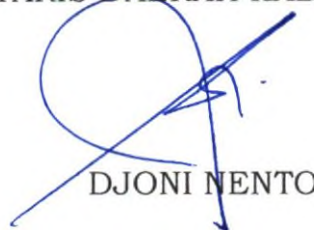


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, **14 Mei** 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO **TAHUN 2020 NOMOR 33**

PARAF KOORDINASI							
KABID. <i>Alggan</i>	KEPALA. <i>BCD</i>	KABAG. HUKUM	AST. BID. <i>POHUWATO</i>	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP	
							